



KR-Antara/M Risyah Hidayat

TOL PALING SEPI: Foto udara suasana Jalan Tol Samarinda-Balikpapan yang terlihat dari Kawasan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (3/9/2024). Menurut laman Badan Pengatur Jalan Tol bpjt.pu.go.id, pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan yang pertama di Kalimantan sepanjang 99,35 kilometer dengan dana investasi mencapai Rp 9,9 triliun disebut paling sepi di Indonesia.

SOAL CUTI KAMPANYE KEPALA DAERAH

Warga Kendal Ajukan Uji Materi ke MK

JAKARTA (KR) - Harseto Setyadi Rajah, warga Kabupaten Kendal Jawa Tengah mengajukan uji materi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan cuti kepala daerah pada masa kampanye. Pasal tersebut dinilai merugikan karena ketentuan pasal tersebut membuat kepala daerah yang sedang menjabat dan mencalonkan diri kembali dalam pilkada harus cuti penuh selama masa kampanye.

"Ini tentunya merugikan hak konstitusional warga masyarakat, terutama pemohon, karena akhirnya tidak bisa mendapatkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal. Apalagi, banyak kepala daerah yang kemudian mencalonkan, tapi masa jabatannya dipotong karena pilkada serentak," ujar kuasa hukum Harseto, Viktor Santoso Tandiasa usai mendaftarkan permohonan kliennya di Gedung I MK Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut Viktor, sebagai warga negara yang membayar pajak, kliennya berhak mendapatkan pelayanan publik yang optimal. Hal itu, salah satunya, dipengaruhi masa jabatan kepala daerah yang optimal. "Bahkan dia punya ikatan komitmen janji politik dengan calon

kepala daerah pada saat pilkada sebelumnya. Ketika itu tidak dipenuhi secara optimal, maka di situlah hak konstitusional dirugikan sebagai warga masyarakat daerah, sebagai juga pembayar pajak," tuturnya.

Pasal 70 Ayat (3) yang diujimaterikan itu mengatur bahwa kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan. Menurut Viktor, pejabat atau pelaksana tugas sementara yang menggantikan kepala daerah yang menggantikannya tidak petahana dikhawatirkan tidak mampu menjalankan tugasnya secara optimal, sebab harus berbagi fokus dengan jabatan definitifnya. KPU telah menetapkan masa

kampanye Pilkada 2024 dilaksanakan selama 60 hari, yakni pada 25 September - 23 November 2024. Artinya, jika mengikuti ketentuan Pasal 70 Ayat (3) UU Pilkada, calon kepala daerah petahana harus cuti selama 60 hari dan digantikan sementara oleh penjabat atau pelaksana tugas.

Menurut Viktor, ketentuan Pasal 70 Ayat (3) UU Pilkada berbeda dengan mekanisme cuti bagi petahana dalam UU Pemilu. Pasal 281 Ayat (2) UU Pemilu menyebutkan bahwa pelaksanaan cuti dan jadwal cuti harus dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan pasal itu, presiden maupun wakil presiden yang kembali ikut dalam kontestasi pilpres tidak harus menjalani cuti penuh selama masa kampanye.

"Sehingga setelah selesai kampanye, dia bisa bekerja lagi. Nanti masuk dalam masa kampanye, dia cuti lagi. Lalu kemudian setelah selesai, dia bisa bekerja lagi. Jadi, tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala penyelenggara daerah ataupun penyelenggara pemerintah pusat," ujar Viktor. (Ant/Has)-f

SOAL PUTUSAN SELA GAZALBA SALEH

KY Beri Sanksi Ringan Satu Hakim

JAKARTA (KR) - Komisi Yudisial (KY) memberi rekomendasi sanksi ringan kepada salah satu hakim terkait putusan sela mantan Hakim Agung Gazalba Saleh karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Sementara dua hakim terlapor lainnya yang memutus putusan sela tersebut tidak terbukti melanggar KEPPH, sehingga namanya baiknya akan dipulihkan.

"Melalui sidang pleno, KY memutuskan salah seorang hakim yang menyidangkan kasus tersebut direkomendasikan untuk diberikan sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis," kata Anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (3/9).

Sementara untuk dua hakim terlapor lainnya, menurut Mukti Fajar, tidak terbukti melanggar KEPPH. Sehingga KY akan memulihkan nama baik melalui surat yang ditembuskan kepada atasan hakim terlapor secara berjenjang.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan majelis hakim yang menggabungkan nota keberatan atau eksepsi Gazalba Saleh dalam perkara dugaan korupsi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). KY telah memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Proses pemeriksaan telah dilakukan terhadap pelapor dan saksi, serta pemeriksaan atau klarifikasi terhadap majelis hakim yang dilaporkan.

"Pemeriksaan ini sebagai hak jawab atas dugaan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan oleh pelapor, maupun temuan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperoleh KY," kata Mukti.

Diketahui, Gazalba tersandung kasus dugaan korupsi penanganan perkara di MA. Dalam kasus itu, Gazalba didakwa menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total nilai Rp 62,89 miliar. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/5), menggugat eksepsi Gazalba. Majelis hakim itu terdiri dari Fahzal Hendri selaku ketua, dengan Rianto Adam Pontoh dan Sukartono selaku anggota.

(Ant/Has)-f

DALAM SATU DEKADE TERAKHIR DI INDONESIA

Permukaan Air Laut Naik 1 Cm/Tahun

BALI (KR) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya kolaborasi negara berkembang di Kawasan Selatan-Selatan untuk membangun daya tahan terhadap potensi peningkatan permukaan air laut.

"Ketika berbicara peningkatan permukaan air laut, harus ada adaptasi secara holistik," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di sela panel diskusi Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak dan Forum Indonesia-Afrika di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (3/9).

Dwikorita mengungkapkan tren selama sekitar satu dekade terakhir atau pada Januari 2014 hingga Desember 2023, permukaan air laut di Indonesia yang termasuk wilayah Pasifik bagian barat mengalami kenaikan mencapai hingga rata-rata 10 milimeter (mm) atau 1 centimeter (cm) pertahun.

Peningkatan itu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global untuk kenaikan permukaan air laut

mencapai hingga 4,7 milimeter pertahun.

"Jadi ini sangat serius untuk Indonesia dan itu tanpa mempertimbangkan penurunan muka tanah dan hal lainnya," ucapnya.

Apabila ditarik mundur, lanjut Dwikorita, secara global peningkatan permukaan air laut mencapai rata-rata 2,13 mm/tahun pada 1993 hingga 2002 dan pada 2003-2012 mencapai rata-rata 3,33 mm/tahun.

Menyikapi fenomena itu, pihaknya telah melakukan pelatihan tak hanya di dalam negeri tapi juga negara-negara kepulauan di Kawasan Pasifik sejak 2018 mengingat peningkatan permukaan air laut itu mengancam negara kecil kepulauan.

Pelatihan itu berupa prakiraan meteorologi, tsunami, dan program lain terkait keamanan pesisir laut dan bencana terkait lainnya menyangkut penilaian risiko dan sistem peringatan dini, di antaranya di Papua Nugini, Tonga, hingga di Kepulauan Solomon.

Selain kerja sama Selatan-Selatan, ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan terstandarisasi dalam sistem pengukuran peningkatan permukaan air laut. Kemudian, sinergi melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan pentingnya kesiapan masyarakat untuk melakukan aksi dini untuk mendukung daya tahan.

Dwikorita menambahkan, peningkatan permukaan air laut merupakan dampak dari perubahan iklim. Selain itu, ada beberapa indikator lain yang ikut berkontribusi, antara lain suhu dan cuaca ekstrem dengan frekuensi yang intensif dan durasi yang lebih lama.

Hal lain yang mendorong naiknya permukaan air laut, kata Kepala BMKG, kondisi meteorologi khususnya ada kombinasi penurunan muka tanah akibat konsumsi air tanah. "Semua terintegrasi, jadi dampaknya mengumpul simultan," ucapnya sembari menambahkan, kondisi itu mendorong perlunya upaya holistik bersama. (Ant/San)-d

PANIRADYA GELAR SINAU SEJARAH

Nilai Penting Sejarah Bisa Jadi Kaca Benggala

YOGYA (KR) - Amanat 5 September menunjukkan sikap politik Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. "Ini sesuatu yang luar biasa di mana jiwa patriotisme dan nasionalisme beliau berdua menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai tanah airnya," kata Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho SP MSi terkait acara Sinau Sejarah Keistimewaan DIY, Amanat 5 September.

Acara bertema 'Keistimewaan DIY dalam Bingkai NKRI' ini akan digelar Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY, Kamis (5/9), pukul 09.00-13.00 di SMA Negeri 1 Prambanan, Sleman, dan ditayangkan melalui channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Selain pemutaran video dokumenter 'Amanat Dwi Tunggal' ada pula Dialog Keistimewaan bertema 'Keistimewaan DIY dalam Bingkai NKRI' dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Dr Sri Margana MHum (Sejarawan UGM), Widiasto Wasana Putra SSoS (Ketua Sekber Keistimewaan DIY) dipandu moderator Wijil Rachmadani.

Sinai Sejarah akan dimirahkan karawitan dan tari siswa SMA Negeri 1 Prambanan, Sleman serta penampilan grup musik The Flashback.

Mengenai Amanat 5 September, lebih lanjut Aris mengatakan, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII berjiwa besar, mengorbankan kepentingan beliau, karena ketika itu Kasultanan dan Kadipaten adalah negara yang berda-



KR-Wawan Isnawan
Aris Eko Nugroho SP MSi

ulat, tapi kemudian beliau berdua bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, lanjut Aris, beliau berani membela kebenaran dan juga tegas ketika ada ancaman dari pihak luar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Sultan HB IX dan Paku Alam VIII juga memegang komitmen mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan beliau sangat bijaksana dalam menyikapi peristiwa yang terjadi di Yogyakarta dan menjadikan Indonesia bisa seperti sekarang ini.

Menurut Aris, kepemimpinan dwi tunggal (*loro-loroning atunggal*) Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menjadi bagian sejarah yang luar biasa. Sebab dua negara yang berdaulat ketika itu kemudian bersatu mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana

pada saat itu sebenarnya belum ada kejelasan apakah negara ini bisa berkembang atau bahkan sebaliknya.

"Kami melihat beliau mempunyai spirit visioner dan juga strategis di dalam menyikapinya dengan melakukan aktivitas yang sangat bijaksana. Selain itu juga beliau menampilkan sebagai negarawan yang sangat cinta terhadap tanah air dengan bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Terkait sejarah, menurut Aris, ini bagian penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Mengingat sejarah itu ada yang bernilai positif ada juga yang bernilai negatif. "Harapan kita dari kedua hal tersebut bisa diambil sarinya, bisa diambil nilai pentingnya sehingga bisa mewarnai pembangunan mendatang," katanya.

Jika sekarang ada beberapa yang menganggap sejarah itu adalah suatu kemunduran, menurut Aris, itu tidak tepat. "Inilah yang kemudian harus kita luruskan," katanya.

Karena itu, Paniradya Kaistimewan DIY terus berusaha mengenalkan sejarah kepada masyarakat, khususnya generasi muda, baik menjalin kerja sama dengan Sekber Keistimewaan DIY, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan kesejarahan di Yogyakarta maupun melalui media sosial seperti YouTube.

"Harapannya tentu saja nilai-nilai penting yang ada dalam sejarah itu bisa menjadi kaca benggala bagi kita semua, terutama generasi muda untuk mengarah ke depan yang lebih baik," katanya pula. (Wan)

SUDAH 20 TAHUN BERJALAN

DPR Didesak Sahkan RUU PPRT

JAKARTA (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) harus mengambil langkah tegas untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sudah 20 tahun berjalan. Dengan disahkan RUU PPRT ini dapat memberikan manfaat atas jaminan sosial kepada para PRT yang saat ini tidak terurus secara benar, baik dari upah hingga jaminan kesehatan dan masa tua.

"Pada periode ini, saya rasa DPR perlu mengambil langkah untuk menyetujui atau mengesahkan RUU PPRT ini menjadi undang-undang, sebagai warisan berharga bagi masyarakat sebelum berakhir masa periode saat ini," kata Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq melalui video streaming di gedung DPR/MPR RI, Selasa (3/9).

Ia menyebutkan, RUU PPRT harus diperjuangkan. Karena di dalamnya terdapat berbagai perlindungan bagi para PRT. "Kita tahu saat ini PRT bekerja tanpa kontrak kerja yang jelas dan juga upah seadanya," tandas Maman.

Tidak hanya memberikan manfaat jaminan sosial yang jelas bagi para PRT, RUU PRT ini, ujar Maman Imanulhaq, juga memberikan rasa aman kepada para PRT yang sering diintai dengan kekerasan fisik dan psikis dari oknum majikan yang tidak bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, menurut Maman, pembahasan RUU PPRT lebih lanjut akan membuka wawasan publik terhadap pentingnya perlindungan PRT. Apabila RUU PPRT disahkan menjadi UU, yang juga memuat pasal perlindungan kepada PRT,

bisa menjadikan hubungan kerja di dalam ranah domestik menjadi lebih baik.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan, bola panas RUU PPRT ada di tangan pimpinan DPR RI, sebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) dan menunjuk perwakilan pemerintah untuk membahasnya bersama DPR.

Pada Maret 2023, DPR RI telah menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Presiden juga telah mengirim daftar inventaris masalah (DIM) RUU PPRT ke pimpinan DPR dan menunjuk kementerian yang mewakili pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan, para pekerja rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan dari semua pihak agar merasa aman dan nyaman melalui disahkannya RUU PPRT.

Menurut Andy, RUU PPRT yang sudah ada selama 20 tahun menjadi pembahasan, saat ini hanya menjadi simbolik yang dipenuhi agenda tawar-menawar dan sudah tidak memiliki semangat pada saat awal RUU PPRT itu dirancang. Dengan disahkannya RUU PPRT ini, dapat memberikan banyak manfaat kepada para PRT yang saat ini sudah mencapai 5 juta pekerja di seluruh Indonesia.

Angka itu, katanya, bisa jauh lebih besar. Jika dikalkulasikan, jumlah PRT di Indonesia mencapai 60 jutaan. Hal tersebut, dihitung dari sepertiga orang menengah ke atas yang ada di Indonesia selama 2024. (Ant/Obi)-f



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

PENINGKATAN PENUMPANG DOMESTIK: Calon penumpang pesawat memasuki ruang keberangkatan di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (3/9/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penumpang pesawat domestik pada Juli 2024 tercatat 6 juta orang atau meningkat 11,04 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan itu didorong salah satunya oleh peningkatan aktivitas masyarakat selama periode liburan sekolah yang berlangsung hingga pertengahan Juli, serta diskon tiket pesawat yang ditawarkan sejumlah maskapai.